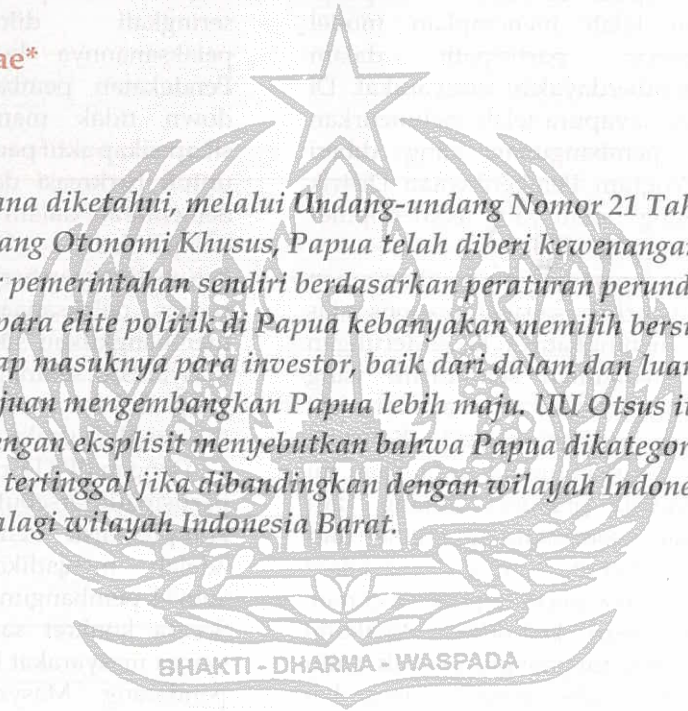


MENSEJAHTERAKAN PAPUA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISTRİK DAN KAMPUNG

Oleh : Habel Suwae*

Sebagaimana diketahui, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Papua telah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundangan. Dengan Otsus para elite politik di Papua kebanyakan memilih bersikap terbuka terhadap masuknya para investor, baik dari dalam dan luar negeri untuk tujuan mengembangkan Papua lebih maju. UU Otsus itu pun memang dengan eksplisit menyebutkan bahwa Papua dikategorikan sebagai daerah tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Tengah dan apalagi wilayah Indonesia Barat.



*Doktor lulusan UGM, pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura selama dua periode. Aktif dalam organisasi politik, dan sekarang Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua.

Pilihan strategis politik pembangunan seperti itu membawa konsekuensi daerah ini terus berkembang baik secara politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Dalam bidang politik, proses demokrasi terus bergulir tercermin dalam proses Pemilu Kepala Daerah secara langsung. Lebih dari itu melalui prinsip demokrasi politik, terus dipakai dalam untuk mengubah paradigma pembangunan yang lebih partisipatif. Maka di beberapa wilayah Papua, terutama Kabupaten Jayapura telah menerapkan model pembangunan partisipatif dalam upaya memberdayakan masyarakat. Di Kabupaten Jayapura telah meluncurkan program pembangunan yang diberi nama "Program Pemberdayaan Distrik dan Kapung", atau yang lebih populer dengan singkatan PPDK.¹

Konsep dan paradigma pembangunan ini diluncurkan sebagai respons atas semakin meningkatnya kecenderungan pola pembangunan sentralistik yang lebih menggunakan pendekatan dari atas-bawah (*topdown approach*). Berbagai program pembangunan pada saat itu lebih banyak prakarsa datang dari pemerintah, sementara prakarsa dari masyarakat kurang terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi pun kemudian dipahami menurut tafsir tunggal pemerintah, yaitu yang dimaknai seberapa jauh masyarakat melaksanakan program pembangunan yang dirancang dari atas, dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada era Orde Baru sebagian besar proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah adalah proyek sektoral/proyek departemen atau proyek pemerintah pusat. Sementara proyek pemerintah daerah hanya sedikit, yang perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya

dilakukan Pemda sendiri. Sisanya adalah proyek bantuan pemerintah pusat berupaya proyek Inpres, yang perencanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyaknya proyek pembangunan di daerah yang dirancang dari pusat mempunyai implikasi terhadap makin surutnya partisipasi masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Pada waktu itu, partisipasi masyarakat seringkali dilontarkan, tetapi pelaksanaannya kurang diperhatikan. Pendekatan pembangunan yang top-down tidak mampu menggerakkan sikap-sikap aktif pada masyarakat sendiri untuk berkreasi dalam pembangunan. Sementara dalam teori pembangunan menjelaskan, bahwa pembangunan belum dianggap berhasil manakala dalam proses pelaksanaannya belum dapat membangkitkan sikap partisipatif pada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri yang akahirnya mampu secara mandiri melanjutkan usaha pembangunan.

Dengan PPKD, prinsip pembangunan partisipatif tersebut dilaksanakan secara komprehensif dengan sasaran utama adalah menjadikan warga sebagai subyek pembangunan, sehingga mandiri. Secara konkret sasaran PPKD adalah warga masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Masyarakat lokal adalah sejumlah warga yang sudah cukup lama berdomisili pada lokasi tertentu yang mengembangkan kultur atau pandangan hidup bersama (*common way of living*) yang lama-lama menjadi identitas. Di Papua, masyarakat lokal ini mewujud dalam komunitas berbasis etnis yang tersebar di berbagai wilayah baik di pantai dan daratan maupun di pegunungan, serta semuanya membangun identitasnya masing-masing. Di samping itu juga terdapat masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah dan memiliki

1 Urain lebih lengkap terdapat dalam Poli dan Dahlan Abubakar, 2008, *Suara Hati yang Memberdayakan: Gagasan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jayapura*, Makasar: Identitas.

latar belakang etnis, agama, dan kultur yang beragam, dan mereka itu juga mempunyai identitas masing-masing.

PPKD dan Multikulturalisme

Masyarakat Papua kemudian berkembang menjadi masyarakat yang plural, dan masing-masing memiliki identitasnya sendiri. Mereka itu saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan masing-masing menunjukkan identitasnya. Ruang politik dan sosial di Papua membuka akses dan berekspresi bagi semua entitas sosial politik dan kebudayaan yang merupakan elemen keanekaragaman, tetapi masing-masing tidak kehilangan jati dirinya. Dinamika interaksi sosial itu kemudian membawa implikasi pada dua kemungkinan, yaitu menuju proses integrasi atau konflik. Melalui PPKD, keberagaman itu justru dijadikan sebagai modal pembangunan dengan mendorong ke arah tujuan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan berbasis kemandirian dan keberdayaan. Oleh karena itu multikulturalisme menjadi pilihan utama dalam mengkonstruksi identitas kolektif yang bernama Papua. Dengan kata lain, keberagaman dipandang sebagai potensi integrasi, bukan sebagai faktor yang memecah belah.

Para tokoh agama juga menyadari tentang keberagaman sebagai realitas empirik di Papua, terutama jika dilihat dari latar belakang agama. Sebagaimana dikatakan oleh Leo Laba Ladjar (2009), masyarakat Papua adalah masyarakat majemuk, juga dalam hal agama. Konflik antaragama muncul seringkali disebabkan sikap tidak menerima yang lain. Pihak yang berbeda sering dihadapi sebagai anacaman dan lawan yang berbahaya. Oleh karena itu sikap menerima yang berbeda perlu dilatih dan secara sengaja, sebab secara naluri orang takut dan curiga terhadap berbeda,

apalagi yang sengaja dibedakan. Melalui aktivitas berlatih menghargai perbedaan akan dapat dibangun suasana kerjasama yang memupuk rasa saling mencintai dan manusiawi.² Sementara itu Neles Tebay mengatakan perlu melakukan dialog secara tulus dan terus-menerus di antara para pihak yang berkepentingan di Papua guna menciptakan perdamaian di tanah Papua. Pada hakekatnya setiap orang memerlukan perdamaian di Tanah Papua, maka baik orang asli Papua maupun pendatang non-Papua yang hidup dan berkarya di Papua perlu diberi ruang dan kesempatan untuk melibatkan diri dalam proses dialog.³

Sejumlah program pembangunan di Papua, dalam hal ini Kabupaten Jayapura, kemudian dirancang dan dilaksanakan dengan prinsip multikulturalisme. Sebagai ilustrasi misalnya, pemerintah Kabupaten Jayapura dalam tiga tahun terakhir telah menggelar Festival Danau Sentani tahunan yang merupakan media bagi ekspresi kebudayaan yang datang dari berbagai latar belakang etnis. Berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian khas Papua, Wayang Kulit Jawa, Tari Kuda Lumping dan Tari Gambyong Jawa Tengah, Tari Remo Jawa Timur, Pendet Bali, Tari Dero Sulawesi Selatan, dan lain-lain.⁴

Dalam bidang hubungan antaragama, pemerintah Kabupaten Jayapura juga menggelar program acara Safari Ramadhan dan Safari Natal. Program ini digunakan sebagai media untuk memelihara kerukunan umat beragama, terutama antara umat Kristiani dan umat Islam, dua agama yang merupakan

2 Uraian lebih lengkap dapat dibaca dalam Leo Laba Ladjar, 2009, *Membangun Papua Tanah Damai*, Jayapura: Sekretariat Keuskupan Jayapura.

3 Neles Tebay, *Kata Pengantar* dalam Leo Laba Ladjar, 2009, *ibid.*

4 Anto Dwiastoro dan Toni Sri, 2009, *Doors to the Unknown: The Story of Sentani in the Jayapura Regency of Papua*, Jayapura: TSA Komunika.

mayoritas di Papua. Media ini memfasilitasi berbagai kegiatan terhadap semua warga tanpa membedakan latar belakang agama, artinya umat Kristiani juga berpartisipasi dalam kegiatan Safari Ramadhan, dan demikian pula umat Islam terlibat aktif dalam kegiatan Safari Natal. Melalui kegiatan berspirit multikulturalisme ini, sekaligus membangun identitas kepapuan yang plural dan terbuka. Karena itu berbagai sekte keagamaan yang bersifat eksklusif di Papua tidak mendapat tempat untuk berkembang.

Sementara itu dalam menerapkan kebijakan pada sektor birokrasi pemerintahan, Pemkab Jayapura selama ini juga menghindari prinsip geneologis dan etnosentrisme. Eselonisasi dalam jajaran birokrasi sama sekali tidak mempertimbangkan putra daerah. Mirit sistem benar-benar diterapkan, dalam arti penunjukan pejabat eselon berdasarkan profesionalisme, dan bukan atas dasar sentimen etnis. Di Papua jabatan seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dan pimpinan proyek strategis, banyak dijabat oleh pegawai yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Bali, Batak, Bugis, Manado, dan lain-lain.⁵

Sedangkan dalam bidang sosial-ekonomi, Pemkab Jayapura, sama sekali tidak menerapkan kebijakan yang mengarah pada segregasi sosial. Semuanya dibiarkan tumbuh secara natural, dalam arti mengikuti hukum pasar. Karena itu seperti di daerah lain, di Papua sektor perdagangan banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa dan Bugis Makasar. Sedangkan etnis Jawa banyak bergerak pada sektor informal dan pertanian. Meskipun demikian warga Papua asli kemudian mulai masuk ke dalam berbagai sektor strategis tersebut, sehingga membentuk identitas baru yang mengaburkan stigma sosial, seperti orang

5 Dikutip dari Profil Kabupaten Jayapura, 2009, Sambutan Bupati Kabupaten Jayapura.

Papua tertinggal dan tidak transformatif. Di sektor pertanian, kakao misalnya, sekarang telah menjadi identitas baru warga Kabupaten Jayapura, karena baik etnis Jawa maupun penduduk asli telah menjadi subyek dalam budidaya tanaman kakao, yang sekarang sangat populer sebagai identitas warga Jayapura.⁶

Semua itu menunjukkan bahwa konstruksi identitas kepapuan terus mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Identitas pun telah menjadi diskursus yang terus menyebar dan terbuka. Sebagaimana dikatakan oleh Michel Foucault bahwa sebuah wacana atau diskursus bukan saja berhenti dalam tataran teoretik, tetapi sekaligus merupakan praktik kebudayaan. Dengan mengutip definisi dari Lupton dan Barclay, Ruth Quibell mengatakan ;

Discourse are understood as ways of representing-talking about or visually portraying - phenomena and the practices of material conditions associated with these presentations. Discourses are expressed in texts (whether written, oral or visual) and in social and embodied practices...Discourse may be regarded as assemblages of knowledge that serve to produce notions of the human subject.

Phillips (1998) juga menjelaskan pengertian discourse sebagai berikut:

a mode of action in dialectical relationship with other aspects of the social... Discourse represent an important type of social practice that constitutes identities, social relations and representations of the world and both shapes and is shaped by others practices.

Discourse merepresentasikan, mengkonstruksi dan menyatakan apa yang riil yaitu bentuk-bentuk praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

6 Profil Kabupaten Jayapura, 2009, ibit.

7 Quibell, Ruth, Unmaking The Others ? ; Discourses of Intellectual Disability in Contemporary Society, Department Of Sociology, Faculty of Life and Social Sciences, Swinburne University of Technology Hawthorn Australia, 2004.

Representasi itu berbentuk bahasa (language), elemen materiil dan praktik. Tapi *discourse* tidak hanya ditemui di dalam teks.

Pilihan multikulturalisme sebagai pijakan identitas kepapuan itu juga sesuai dengan realitas empirik masyarakat Papua yang cenderung semakin plural. Selama ini kalau membicarakan identitas Papua, kekentalan nuansa etnis masih sangat terasa. Konstruksi identitas kepapuan yang berkembang selama ini lebih tarasa aspek geneologisnya. Akibatnya identitas Papua identik dengan etnis yang dipahami secara biologis, sehingga membayangkan masyarakat Papua selalu identik dengan etnis berkulit hitam, rambut keriting, dan koteka. Karakteristik biologis itu kemudian lebih menonjol ketika orang melihat masyarakat Papua.

Padahal, masyarakat Papua sekarang telah berkembang menjadi masyarakat yang plural, baik dilihat dari latar belakang etnis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Dilihat dari keragaman latar belakang etnis, masyarakat Papua terdiri atas suku Jawa, Bugis, Maluku, Minang, dan Batak. Dari aspek keagamaan, masyarakat Papua juga terdiri dari berbagai macam agama, seperti Kristen-Protestan, Khatolik, Islam, dan ada juga Hindu.⁸

Sementara itu dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, masyarakat Papua juga bersifat *fragmented*. Mereka yang tingkat ekonomi rendah atau berada dalam kondisi miskin kebanyakan terdiri dari penduduk asli, sebagai akibat keterbelakangan tingkat pendidikan, dan lebih banyak bergerak di sektor pertanian. Sedangkan mereka yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi, adalah para pendatang, yang pada umumnya bergerak pada sektor perdagangan dan industri.

⁸ Dikutip dari Kabupaten Jayapura dalam Angka, 2009, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura.

PPDK dan Sektor Industri

Sektor industri di Kabupaten Jayapura terus mengalami peningkatan, meskipun juga harus diakui menimbulkan eksekse baik sosial maupun pencemaran lingkungan. Beberapa industri yang cukup berkembang antara lain industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronik, serta industri kerajinan. Industri pangan meliputi tempe, tahu, tepung sagu, air kemas, dan minyak kelapa. Sementara itu industri sandang meliputi pakaian jadi, batik khas Papua, dan jahitan. Industri kimia meliputi kayu olahan dan batu ciping. Industri kerajinan merupakan industri yang paling banyak berkembang meliputi industri mebel kayu, mebel rotan, ukir-ukiran baik dari bahan kayu maupun kerang-kerangan, dan kerajinan kulit.

Industri pangan ini jika dilihat dari etnis, harus diakui masih banyak pelakunya yang dari warga non Papua. Warga pendatang umumnya menguasai dalam industri pangan karena telah memiliki kultur pangan yang lebih beraneka ragam. Pengolahan hasil pertanian misalnya, banyak dikuasai oleh warga pendatang, seperti industri kue dari berbagai bahan baku. Sementara itu warga Papu asli juga sudah mulai mengembangkan industri pangan, terutama yang terbuat dari sagu. Kemampuan pengolahan hasil pertanian warga Papua ini menarik, karena juga menjadi salah satu pembentuk identitasnya. Jika warga Papua New Guenia kurang memiliki kemampuan mengolah budidaya pangan karena semuanya serba pangan instans kalengan, tetapi warga Jayapura sudah banyak yang memiliki kemampuan mengolah pangan dari bahan sagu, dan bahkan tepung terigu dan beras. Proses pembentukan identitas dari sektor industri sandang ini sedikit banyak juga

semakin menegaskan bahwa identitas warga Papua terus berada dalam proses dinamik.

Demikian pula industri kerajinan, banyak orang Papua asli mengembangkan seni kerajinan untuk souvenir atau cendera mata khas Papua. Cendera mata yang terbuat dari tempung yang dikombinasikan dengan kulit kerang misalnya, sudah banyak diproduksi oleh warga Papua asli. Pemkab Jayapura pun menyadari perlunya mendorong kapasitas para pengrajin ini, maka di samping memberi bantuan modal juga memberi bantuan pengembangan sumber daya manusianya dengan mendatangkan pengrajin dari Jawa. Semuanya untuk menambah keterampilan, daya imajinasi, dan inovasi, sehingga produk kerajinan Papua semakin diterima oleh pasar yang semakin kompetitif.

Penutup

Begitulah, melalui PPDK terbukti masyarakat Papua mulai mengenal bagaimana harus mandiri dengan kemampuan sendiri, tidak seperti

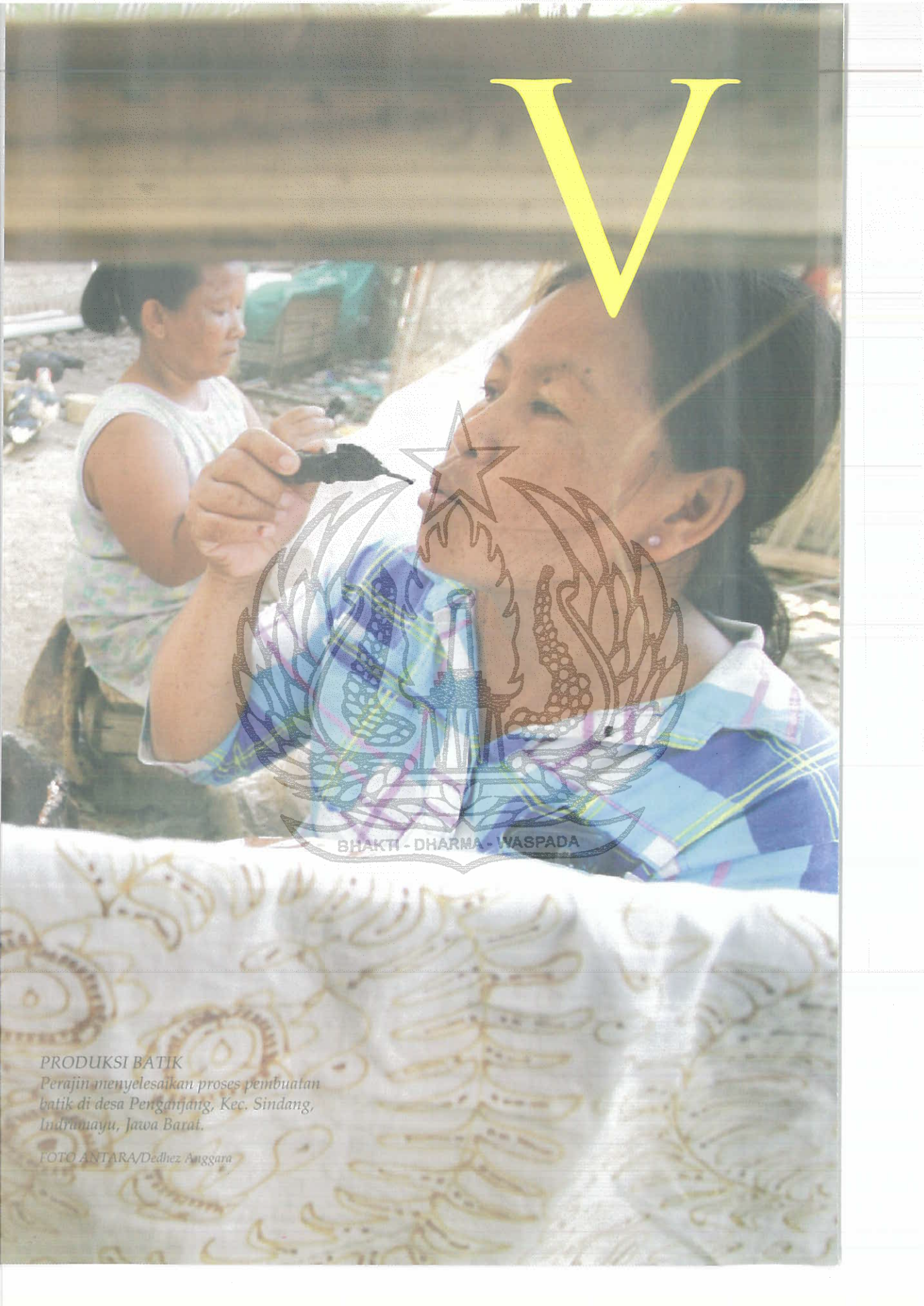
selama ini yang dicitrakan sebagai warga tertinggal. PPDK terbukti mampu memberikan arena bagi warga Papua di kampung-kampung untuk berkreasi dan berinovasi berbasis potensi lokal. Tidak lagi hanya mengandalkan pada fasilitas alam yang tinggal mengkonsumsi, tetapi mulai menyadari bahwa bahan alam perlu diolah sebelum dikonsumsi. Dengan PPDK terbukti menyadarkan orang Papua bahwa mereka bisa berkreasi dan menunjukkan kemampuannya kepada dunia luar, dan arena itu program ini sekaligus menjadi arena untuk mengembangkan peradaban warga Papua.

Pemerintah terus berupaya memberikan dana rangsangan untuk program ini, karena terbukti mampu menjadi wahana pembangunan partisipatif. Kombinasi dana rangsangan dan inisiatif dari bawah melalui pembuatan proposal usulan warga, ternyata PPDK mampu menjadi program unggulan yang mendorong masyarakat Papua menatap masa depannya dengan lebih baik.



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

V



PRODUKSI BATIK
Perajin menyelesaikan proses pembuatan
batik di desa Penganjatg, Kec. Sindang,
Indramayu, Jawa Barat.

FOTO ANTARA/Dedhez Anggara

